

Bandara Ujoh Bilang Jadi Prioritas Nasional



Sumber gambar: Tribun Kaltim Senin, 13/01/2025

UJOH BILANG, TRIBUN - Sekretaris Daerah Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang, mengungkapkan kabar baik soal pembangunan Bandara Ujoh Bilang. Bandara ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, menjadikannya salah satu dari dua bandara di Indonesia yang mendapatkan prioritas.

“Masuknya Bandara Ujoh Bilang dalam dokumen RPJMN sangat penting karena menjadi acuan alokasi anggaran tahunan dari Kementerian Perhubungan,” katanya, Minggu (12/1).

Tim survei dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melakukan kunjungan ke Tana’a Urip Kerimaan pada Kamis (14/11/2024) lalu. Mereka melaporkan hasil observasi dokumen dan pantauan lapangan, yang disambut antusias oleh pemerintah daerah.

“Mereka membawa kabar gembira. Ini membuktikan bahwa perjuangan panjang kita untuk menghadirkan bandara ini mulai membuahkan hasil,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa alokasi anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat segera turun untuk mempercepat penyelesaian pembangunan.

Delapan tahun setelah gagasan hadirnya bandara ini dirintis, harapan itu kian nyata dengan pembangunan landasan pacu tahap awal sepanjang 750 meter dan lebar 23 meter pada 2024. “Menurut perencanaan, landasan pacu di bandara ini dibangun bertahap hingga mencapai 2.600 meter. Jadi, simultan fisik dan perizinan sama-sama jalan,” kata Stephanus.

Rencana pembangunan bandara ini sebenarnya telah dicanangkan sejak 2016 oleh Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh.

Dalam kurun waktu itu, upaya yang tak kenal lelah dilakukan, mulai dari menyiapkan kajian pendahuluan, proses perizinan, hingga menggalang dukungan pemerintah pusat dan provinsi.

“Angin segar ini tidak datang tiba-tiba. Selama delapan tahun, Bupati Bonifasius bersama jajaran terus memperjuangkan keberadaan bandara ini,” ungkap Stephanus.

Kini, pembangunan fisik dan perizinan berjalan beriringan. Upaya ini menjadi bukti nyata dari sinergi pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. “Kami optimistis bandara ini akan menjadi infrastruktur vital yang mengubah wajah Mahulu ke depan,” katanya penuh harap.

Percepat MoU

Salah satu langkah strategis adalah mendorong terwujudnya nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Mahulu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), dan Kementerian Perhubungan. “Harapan kami, dengan adanya payung hukum melalui MoU, pada 2025-2026 sudah ada kepastian pengalokasian dana dari pemerintah pusat,” tuturnya.

Ia menjelaskan, MoU ini akan menjadi landasan bagi pemerintah provinsi untuk menganggarkan kebutuhan pembangunan bandara dalam APBD provinsi. “Kami mendorong MoU supaya provinsi memiliki pedoman dan landasan payung hukum untuk menganggarkan di APBD provinsi,” imbuhnya.

Sembari menunggu alokasi dana dari pusat dan provinsi, Pemkab Mahulu tetap bergerak sesuai kemampuan keuangan daerah. “Kami tidak sekadar berpangku tangan. Intervensi awal, seperti pembebasan lahan dan pembangunan *airstrip* atau landasan pacu secara bertahap, sudah kami jalankan,” sebutnya.

Ia menambahkan, rencana pembangunan bandara ini terbagi menjadi dua sisi utama, yakni sisi darat dan sisi udara. Semua elemen dikerjakan secara simultan untuk memastikan keberlanjutan proyek yang menjadi tumpuan harapan masyarakat Mahulu.

“Kami optimistis dengan sinergi yang solid antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, Bandara Ujoh Bilang akan segera terwujud dan menjadi infrastruktur vital bagi konektivitas dan pembangunan Mahulu. Ini bukan sekadar proyek, tetapi harapan yang sedang kami wujudkan bersama,” pungkasnya. **(tar)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Bandara Ujoh Bilang Jadi Prioritas Nasional, 13/01/2025
2. Kaltim.tribunnews.com, Bandara Ujoh Bilang Jadi Prioritas Nasional Karena Masuk di RPJMN 2025-2029, 12/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Letak Kebandarudaraan Nasional (Permenhub PM 39/2019), tata letak kebandarudaraan nasional adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi,

- kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.
2. Dalam Pasal 4 ayat (1) Permenhub PM 39/2019 diatur bahwa tatanan kebandarudaraan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan tujuan agar penyelenggaraan bandar udara secara andal, terpadu, efisien, serta mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara.
 3. Diatur dalam Pasal 19 Permenhub PM 39/2019 bahwa rencana induk nasional bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
 - d. potensi sumber daya alam;
 - e. perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun internasional;
 - f. sistem transportasi nasional;
 - g. keterpaduan intermoda dan multimoda; dan
 - h. peran bandar udara.
 4. Dalam Pasal 32 Permenhub PM 39/2019 diatur bahwa rencana pembangunan dan pengembangan bandar udara untuk mewujudkan kebijakan nasional bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, huruf b, dan huruf d terdiri atas:
 - a. bandar udara di daerah ibukota provinsi dibangun atau dikembangkan dengan klasifikasi landas pacu 4C;
 - b. bandar udara di daerah perbatasan negara dan daerah lokasi bencana dan daerah rawan bencana dibangun atau dikembangkan dengan klasifikasi landas pacu 3C; dan
 - c. bandar udara di daerah terisolasi dan di daerah provinsi kepulauan dibangun atau dikembangkan dengan klasifikasi landas pacu 2C.